

EFEKTIFITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIGH
KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

MUHAMMAD FADHIL
NIM. 022118.3008



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H

EFEKTIFITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIGH
KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Pada
Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:
MUHAMMAD FADHIL
NIM. 022118.3008



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1441 H

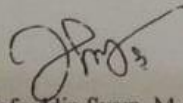
**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM MENYELESAIKAN
KASUS PERCERAIAN PADA KELUARGA JAMAAH TABLIGH
KABUPATEN DELI SERDANG**

Oleh:

MUHAMMAD FADHIL
NIM. 022118.3008

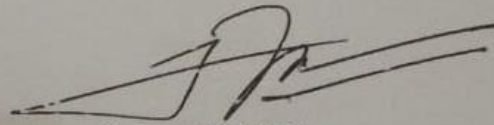
Menyetujui

PEMBIMBING I



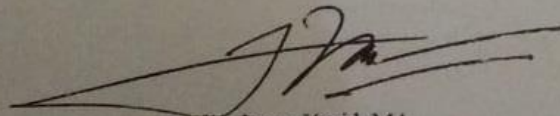
Dr. Syafruddin Syam, M. Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

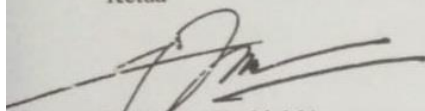
PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 21 April 2021.

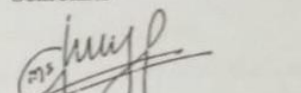
Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Medan,
Panitia Ujian Tesis Fakultas
Syariah dan Hukum UIN SU
Medan

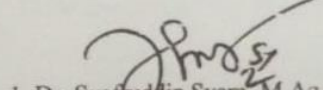
Ketua



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

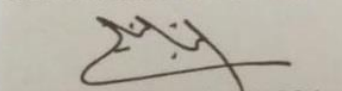
Sekretaris

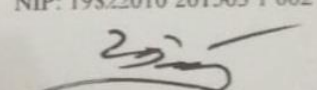

Faimah Zahara, S.Ag., MA
NIP. 19730208 199903 200 1

Anggota-Anggota


1. Dr. Syafuddin Syam, M.Ag
NIP: 19750531 200710 1 001


2. Dr. Imam Yazid, MA
NIP: 19822010 201503 1 002


3. Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002


4. Dr. M. Amar Adly, MA
NIP: 19730705 200112 1 002

Mengetahui,
Bekas Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FADHIL

NIM : 0221183008

Tempat/Tgl Lahir : Batang Kuis, 28 Juni 1996

Fak/Prodi : Syariah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsyah

Pekerjaan : Guru

Alamat : No. B3 Komplek Jati Indah Laut Dendang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul **"Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang"** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan arahan dari tim pembimbing, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil dokumen dari beberapa sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 09 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadhil
NIM: 0221183008

ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan yang disebut dengan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa keluarga muslim. Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan disebut dengan litigasi. Menariknya pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, dalam penyelesaian sengketa keluarga tidak melalui cara litigasi sebagai prosedur penyelesaian sengketa, akan tetapi melalui cara mediasi yang dalam istilah fikih disebut dengan *ṣulh*. Dalam perkembangannya, mediasi sudah menjadi bagian dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan sengketa keluarga pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *ṣulh*, dan teori efektifitas menurut KBBI. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, mediasi sebagai penyelesaian sengketa keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap program kerja Jamaah Tabligh yang menjadi sebab timbulnya kasus perceraian. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan dalam mediasi non litigasi Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang yaitu, pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Kedua, berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, ditemukan bahwa mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan efektif, karena *out put* (hasil) sudah mencapai tujuan dilaksanakannya mediasi. Namun, menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi non litigasi pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang bukan termasuk bagian dari prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hasil kesepakatan mediasi tersebut tidak berhak memiliki sertifikat hasil mediasi dan tidak memiliki kekuatan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang telah mengaruniakan nikmat yang begitu banyak dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Drs. Zainuddin dan Ibu Saidah yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Imam Yazid, MA selaku ketua program studi Magister Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Tesis II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses menyelesaikan tesis dan studi penulis.
6. Ibunda Fatimah Zahara, S.Ag., MA selaku sekretaris program studi Jurusan Magister Hukum Keluarga yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Ayahanda Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Pembimbing Tesis I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tesis ini.
8. Istri tercinta Nur Afni, S.Pd dan buah hati kami Muhammad Afqah Adly yang telah memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan tesis dan studi penulis.
9. Kakak tersayang Azliatul Fahma, S.Pd.I dan Fajriah Hasanah, S.Pd, Adik tersayang Siti Maimunah dan Muhammad Alfin Fikri.
10. Sahabat-sahabat terbaik seluruh mahasiswa MHK angkatan tahun 2018 yang telah memberikan kenangan terindah bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 14 April 2021

Penulis,

Muhammad Fadhil
NIM. 0221183008

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 10
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Mediasi	10
2. Jamaah Tabligh	32
3. Efektifitas	44
4. Konflik dan Perceraian	45
B. Hasil Penelitian yang Relevan	48
C. Kerangka Pemikiran	51
 BAB III METODE PENELITIAN	 54
A. Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	55
D. Instrumen Pengumpulan Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	60

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
	A. Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	62
	1. Tujuan Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	63
	2. Faktor yang Melatar Belakangi Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	64
	3. Mediator Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	69
	4. Proses Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	72
	B. Efektifitas Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang	75
BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran	93
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, secara umumnya yaitu, untuk membangun keluarga sakinah, untuk regenerasi, untuk pemenuhan kebutuhan biologis, untuk menjaga kehormatan, dan untuk tujuan ibadah.² Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah sebagaimana firman Allah Swtdalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 dan surah Al-Nisa ayat 1:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/٣٠:٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21).³

¹Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*(Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 48.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam ndonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*(Yogyakarta: Tazzafa, 2013), h. 229.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 306.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/٤:١)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. Al-Nisa: 1).⁴

Realitanya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan, berdasarkan kenyataan ada pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.⁵ Peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perceraian. Atas dasar itu maka salah satu dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan mempunyai prinsip mempersempit jalan perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 (2) UUP dan Pasal 116 KHI.⁶

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ)⁷

⁴Ibid, h. 77.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 101.

⁶Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 56.

⁷Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulug al- Maram min Adillat al-Ahkam* (Makkah: al Haramain, tt.), h. 231.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).*

Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸ Kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam

⁸ Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 11.

perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰

Penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi juga digunakan oleh Jamaah Tabligh khususnya yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Jamaah Tabligh adalah sebuah organisasi non politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali melaksanakan ajaran Islam secara sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Islam. Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang hanya ada di Indonesia akan tetapi merupakan organisasi transnasional yang berasal dari India dan di sanalah markas gerakan dakwah Jamaah Tabligh. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan.

Setiap anggota Jamaah Tabligh atau biasa disebut dengan karkun yang merupakan singkatan dari “karyawan kerja *nubuwwah*”, dianjurkan untuk *khuruj fii sabilillah* minimal 4 bulan dalam seumur hidup, 40 hari setiap tahun dan 3 hari setiap bulan. Ketika seorang *karkun* akan melaksanakan *khuruj fii sabilillah* maka harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun prosedur yang dimaksud diantaranya adalah, harus memiliki bekal yang cukup atau biasa disebut dengan *tafaqud*, menyiapkan keperluan yang cukup untuk keluarga yang ditinggal dan telah disetujui oleh markas atau pusat Jamaah Tabligh dalam satu

¹⁰Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, V. 3 No. 2, h. 2.

wilayah. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa *karkun* yang terlalu semangat untuk melaksanakan *khuruj fii sabilillah* sehingga terkadang tidak meninggalkan keperluan yang cukup untuk keluarga yang ditinggal. Kekeliruan dalam menjalankan prosedur ketika hendak *khuruj fii sabilillah* tersebut memicu terjadinya konflik yang terkadang berujung kepada kasus perceraian. Kasus perceraian pada Jamaah Tabligh adakalanya muncul akibat masalah ekonomi, visi yang tidak sejalan dalam berumah tangga, kesalahpahaman penilaian terhadap program kerja Jamaah Tabligh, dan termasuk ketidaksiapan seorang istri ketika suaminya melaksanakan *khuruj fii sabilillah*, kasus seperti ini biasanya dialami oleh *karkun* yang baru bergabung ke dalam Jamaah Tabligh.¹¹

Bagi keluarga anggota Jamaah Tabligh khususnya yang berdomisili di Kabupaten Deli Serdang apabila terjadi kasus perceraian maka mereka mendatangi ustaz atau tokoh Jamaah Tabligh untuk konsultasi atau meminta nasihat atas masalah mereka. Pada pelaksanaannya yang biasa diminta untuk menjadi mediator oleh jamaah ketika akan menyelesaikan kasus perceraian adalah para *jumidar* atau penanggung jawab *halaqah* Jamaah Tabligh pada suatu wilayah. Apabila mediasi yang dimaksud tidak berhasil mendamaikan para pihak maka penyelesaian kasus perceraian dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Berikut ini tabel yang berisi data pelaksanaan mediasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan hasil olahan data dari wawancara penulis dengan Drs. Zainuddin, Salman bin Sofyan, dr. Inamul Husin Kaban, Mariadi S.Sos.I, MA, dan Ir. Muhammad Ali:

¹¹Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis, 15 September 2020.

Tabel 1. Data Pelaksanaan Mediasi Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 s/d 2020.

No	Mediator	Tahun	Jumlah Pasangan Suami Istri
1.	Salman bin Sofyan	2020	1
		2019	3
		2018	2
2.	Drs. Zainuddin	2020	1
		2019	4
		2018	3
3	Mariadi, S.Sos.I, M.	2019	3
		2018	2
4.	dr. Inamul Husin Kaban	2019	2
		2018	2

Upaya penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaannya memiliki tahapan-tahapan, diantaranya yaitu pengaduan kasus perceraian oleh jamaah kepada tokoh Jamaah Tabligh dalam suatu *halaqah*, pengumpulan data dan pendekatan, sidang mediasi, dan tahap penyelesaian atau akhir proses mediasi.¹² Tahapan-tahapan mediasi tersebut jauh lebih sederhana dibandingkan dengan tahapan-tahapan mediasi yang dipandu oleh seorang mediator profesional, karena memang mediasi pada Jamaah Tabligh bukan bagian dari program kerja

¹² Salman bin Sufyan, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis, 25 Juni 2020.

Jamaah Tabligh melainkan sebuah tanggung jawab para pengurus Jamaah Tabligh terhadap konflik atau kasus perceraian pada keluarga anggota mereka.

Penyelesaian kasus perceraian pada Jamaah Tabligh menarik untuk diteliti karena sengketa yang timbul dalam keluarga Jamaah Tabligh yang berujung kepada kasus perceraian, ada yang disebabkan dari pelaksanaan *khuruj fii sabilillah* sebagai program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Pelaksanaan mediasi pada Jamaah Tabligh tidaklah sama dengan pelaksanaan mediasi pada umumnya, perbedaan antara keduanya terdapat pada penyebab terjadinya konflik dan kasus perceraian dan teknik pelaksanaan mediasi, seperti cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, cara menyampaikan nasihat, dasar argumentasi yang disampaikan dan lain sebagainya. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menyuguhkannya dalam bentuk Tesis yang berjudul “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi berdasarkan latar belakang pada penelitian ini adalah:

1. Faktor yang melatarbelakangi timbulnya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.
2. Kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.
3. Penyelesaian kasus perceraian melalui mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu jauh melebar maka penulis membatasinya hanya pada permasalahan:

1. Mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.
2. Efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian, karena lazimnya yang dijadikan tolak ukur bagus atau tidaknya hasil

penelitian adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.¹³

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memperkaya literatur terkait permasalahan efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, tokoh Jamaah Tabligh Sumatera Utara, para mediator, dan seluruh Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang terkait permasalahan efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

¹³Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, h. 33.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴ Mediasi berasal dari kosakata Inggris yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase” dan *litigation* menjadi “litigasi”.¹⁵

Sedangkan dalam aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 1 Butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 726.

¹⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

¹⁶ Pasal 1 Butir 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Takdir Rahmadi salah seorang pakar mediasi mendefinisikan mediasi sebagai berikut: “Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.”¹⁷

Laurence Bolle, salah seorang ahli resolusi konflik, mendefinisikan mediasi sebagai berikut: “*mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an out come to which of them can assent*”. “Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang mediator, mediator berupaya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat mereka sepakati”.¹⁸

Dari definisi atau pengertian mediasi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.

¹⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 12.

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 4.

- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.¹⁹

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun adakalanya karena beberapa faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim.²⁰

Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah *Dong Teungoh* yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan *sangkepan* (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pengertian rapat ini menunjukkan

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 3.

²⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 13.

bahwa masalah yang dihadapi atau disengketakan harus dimusyawarahkan. Sengketa ini tidak hanya perkara perdata saja, namun juga perkara pidana (kriminal). Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui *runggun*, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang bermasalah, maka hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah "Lembaga Musyawarah *Kombong*". Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil kesepakatan harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan.²¹

b. Mediasi dalam Islam

Al-Qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah diinformasikan Al-Qur'an jauh sebelum manusia diciptakan. Al-Qur'an menggambarkan dengan jelas bagaimana keinginan Allah Swt menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi mendapat tantangan dari malaikat. Malaikat khawatir dengan keberadaan manusia sebagai *khalifah Allah fiial-ard*, karena manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi.²² Dialog malaikat dengan Allah dituliskan dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 30.²³

²¹ Muhammad Saifullah, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 25 No. 25 (Oktober, 2015), h. 5.

²²Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 120.

²³وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/ ٣٠)

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memiliki kecenderungan konflik. Konflik tidak hanya terjadi antara individu, keluarga dan masyarakat, bahkan antar negara juga mengalami konflik. Pada sisi lain, sikap ego (*ananiah*) juga mendorong manusia berkonflik dan melakukan kerusakan. Maka disinilah peran wahyu Al-Qur'an membimbing manusia mengendalikan ego, menggunakan akal, budi, dan menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Al-Qur'an menjelaskan manusia yang mampu mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang tenang (*nafs al-muthmainnah*).

Nilai fundamental penyelesaian sengketa ditemukan dalam nama ajaran agama, yaitu Islam. Kata *al-Islam* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *silmi* dan *salam* yang mengandung arti aman, damai, dan penyerahan diri.²⁴ Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai nama agama, tetapi juga ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaikan konflik.²⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surah al-Anbiya ayat 70.²⁶

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30). Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 6.

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, t.th.), h. 177.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 123.

²⁶ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء/ ١٠٧: ٢)

Dalam Islam mediasi dikenal dengan *al-ṣulḥ*(الصُلح) yang berarti perdamaian atau akad damai antara orang yang berselisih.²⁷ *Ṣulḥ* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Anjuran Al-Qur'an dan Sunah menjadikan *ṣulḥ* sebagai sarana menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, *ṣulḥ* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa mereka.²⁸ Landasan pokok *al-Ṣulḥ* adalah firman Allah Swt QS. Al-Hujurat: 9, QS. Al-Nisa: 114, dan QS. Al-Nisa: 128.²⁹

Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiya’: 107). Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 332.

²⁷Akhyar Ibnu Muhajir, *Kamus Fiqh Plus* (Surabaya: INDAH Surabaya, 1994), h. 118.

²⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 160.

²⁹وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات/٩: ٤٩)

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9). Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 517.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء/١١٤: ٤)

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. Al-Nisa: 114). Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 98.

Menurut Imam Suyuti QS. Al-Nisa: 128 turun karena adanya sebab. Hadis yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat di atas salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

“Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku Rasulullah Saw. bersabda, beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam’ah ketika takut akan dicerai oleh Rasulullah Saw. ia berkata, wahai Rasulullah Saw. berikanlah giliranku untuk Aisyah, maka Rasulullah Saw. melakukannya, Aisyah berkata, tatkala Rasulullah Saw. telah melakukan hal tersebut turunklah firman Allah Swt Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* dari suaminya”. (HR. Abu Dawud)³⁰

Asbabunnuzul surah Al-Nisa ayat 128 menggambarkan bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan giliran harinya pada Aisyah, istri Rasulullah Saw. yang paling muda. Dalam peristiwa ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, namun apa yang dilakukan Saudah adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang selanjutnya ditegaskan dalam syariat Islam dengan turunnya surah Al-Nisa ayat

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا صُلْحًا عَاقِبَةً خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/ ١٢٨: ٤)

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka Allah sungguh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Nisa: 128). Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 100.

³⁰ Jalal al-Din al-Suyuti, *Asbab al-Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur’an, Terj. Tim Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 163.

128 di atas. *Ṣulḥ* yang merupakan bagian dari ajaran syariat Islam melalui pesan-pesan dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas juga didasari oleh hadis Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا, وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ صَحَّحَهُ³¹)

Artinya: “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).

Jumhur ulama bersepakat atas bolehnya perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengakuan bersama. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengingkaran. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-Ṣulḥ* boleh dilakukan di atas pengingkaran, Imam Syafi'i berpendapat *al-Ṣulḥ* tidak boleh dilakukan di atas pengingkaran karena itu merupakan bentuk memakan harta dengan cara batil tanpa penggantian.³²

Umar bin Khattab mewajibkan hakim pada masanya menjadi khalifah untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian, baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan berjalan di pengadilan.

³¹al Hafidz Ibnu Hajar al ‘Asqolani, *Bulug al-Maram Min Adillah al- Ahkam* (Makkah: al Haramain, t.t.), h. 185.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtashid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 545.

Penegasan khalifah Umar diketahui dari surat yang ditulisnya kepada Abu Musa as-Asy'ari, seorang hakim di Kuffah. Umar bin Khattab menulis surat yang berisi prinsip pokok beracara di Pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip mediasi. Hakim wajib menjalankan mediasi kecuali mediasi yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kesepakatan damai tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga dapat diterapkan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.³³

Al-Qur'an mengajarkan adanya mediasi untuk kasus *syiqaq* maupun *nusyuz*. *Syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat zahir maupun batin.

Dalam kasus *syiqaq* yaitu sengketa yang berawal dan terjadi dari kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama. Proses penyelesaian *Syiqaq* adalah dengan melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada surah Al-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء/ ٣٥: ٤)

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

³³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 163.

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Nisa: 35).³⁴

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus hakam atau mediator dalam sengketa *syiqaq*. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan zahir ayat 35 surah an-Nisa bahwa hakam atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq bahwa hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami atau istri yang disetujui oleh mereka sebagai penengah yang akan membantu mencairkan dari kemelut keluarga yang mereka hadapi. Hakam atau mediator yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenangan dalam kasus *syiqaq*. Hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami istri yang sedang didamaikan.³⁵ Pola mediasi dalam kasus *syiqaq* juga dapat diterapkan dalam sengketa *nusyuz*. Allah menegaskan hal ini dalam surah Al-Nisa ayat 128-129:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/ ١٢٩: ٤-١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 85.

³⁵*Ibid*, h. 341.

mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka Allah sungguh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-Nisa: 128-129).³⁶

Ayat ini memang tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa *nusyuz*, namun bukan berarti tertutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang membantu suami istri mewujudkan perdamaian dalam rumah tangga mereka. Istri atau suami yang *nusyuz* sebaiknya proaktif untuk mencari upaya-upaya damai, dan jika tidak mampu maka dapat mengundang pihak ketiga sebagai penengah untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan suami istri. Dalam menghadapi *nusyuz*, suami mendapat tugas utama untuk memperbaiki keadaan istri melalui tahapan-tahapan yang disebutkan Al-Qur'an. Tahapan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi suami istri, tetapi dapat juga menjadi pedoman bagi mediator dalam menyelesaikan sengketa keluarga dalam kasus *nusyuz*.

Al-Qur'an menawarkan tiga langkah dalam menyelesaikan sengketa *nusyuz*, yaitu memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul. Menasihati istri adalah dengan cara mengingatkannya kepada Allah, kewajiban kepada suami. Disamping itu istri mesti diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak mendapatkan nafkah, pakaian, dan akan ditinggalkan di tempat tidur sendirian

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 100.

bilamana ia tetap durhaka kepada suaminya. Tidak boleh memukul istri ketika dia kali pertama berbuat durhaka, maksudnya jika ia tidak berhenti dengan nasihat dan ditinggalkan sendiri di tempat tidur, suami boleh memukulnya dengan tujuan untuk memberi pelajaran. Untuk itu dalam memukul suami hendaklah menjauhi muka dan anggota tubuh yang membahayakan.³⁷

c. Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Peradilan dan di Luar Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pokok perkara diputus oleh hakim di pengadilan tingkat pertama.

Pada dasarnya setiap perkara perdata yang bersifat *contentius*³⁸ dan dihadiri kedua belah pihak wajib dilakukan mediasi, kecuali terhadap perkara yang dilarang mengadakan kesepakatan damai atau apabila terjadi kesepakatan damai, maka akan terjadi pelanggaran hukum. Contoh pembatalan nikah dengan alasan suami istri dilarang melangsungkan perkawinan.³⁹ Dalam acara pembuktian nantinya, maka orang yang menjadi mediator dalam perkara terkait dilarang untuk menjadi saksi dalam permasalahan para pihak tersebut.⁴⁰

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), h. 96.

³⁸ *contentious* adalah perkara perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara dan pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan.

³⁹ Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)* (Medan: CV Dharma, 2012), h. 26.

⁴⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h.83.

Pertemuan mediasi dapat juga dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kehadiran para pihak pada sidang mediasi sifatnya wajib dan hanya dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya apabila memiliki alasan yang sah, yaitu:

- 1) Kondisi kesehatan yang tidak dapat memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter resmi dari pemerintah seperti puskesmas;
- 2) Sedang di bawah pengampunan;
- 3) Mempunyai tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri;
- 4) Sedang dalam menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali.⁴¹

Meski tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara langsung atau melalui kuasanya (apabila disurat kuasa dicantumkan tentang mediasi) tetapi apabila tergugat/termohon tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka keadaan tersebut dicatat dalam BAS bahwa kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya tidak ada mediasi dalam perkara verstek.⁴²

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses mediasi sebelum perkara diputus setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

⁴¹*Ibid*, h. 82-83.

⁴²Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)* (Medan: CV Dharma, 2012), h. 26.

Pertama, Mahkamah Agung telah menghadapi masalah penumpukan perkara yang berkelanjutan. Keadaan ini telah menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum sampai ke Mahkamah Agung. Kedua, pengintegrasian mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri. Ketiga, Perkembangan di negara-negara lain yang memiliki sistem *court-connected mediation* atau disebut juga *court-annexed mediation* seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang dan Australia.⁴³

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan memuat ketentuan-ketentuan mediasi di Pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat.

⁴³ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 68.

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
- 8) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
 - c) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;

- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

d. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa.⁴⁴

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Disamping itu, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi

⁴⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 59.

yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami oleh para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.⁴⁵

Mediator memiliki beberapa fungsi, yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam. Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak. Sebagai pendidik dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa yang enak didengar pihak lainnya. Sebagai narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus memahami bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersifat emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan yang tidak enak didengar dari salah satu pihak. Sebagai agen realitas, mediator harus memberi tahu secara terus terang kepada para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin dicapai melalui sebuah proses perundingan. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan kesepakatan.⁴⁶

Pada dasarnya mediator merupakan hasil pilihan dari para pihak, penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi sukarela.

⁴⁵*Ibid*, h. 63.

⁴⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 15.

Akan tetapi, penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula bersifat sukarela dan kemudian ada yang diwajibkan berdasarkan perintah norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk. Di Indonesia mediator yang ditunjuk dapat ditemukan dalam konteks pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam peraturan ini ketua majelis hakim diberi wewenang untuk menunjuk mediator.⁴⁷

Dalam mediasi ada juga dikenal mediator profesional dan mediator bukan profesional. Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak meminta upah. Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.⁴⁸

e. Mediasi Non Litigasi

⁴⁷*Ibid*, h. 34.

⁴⁸*Ibid*, h. 35.

Dalam aturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan pengertian mengenai litigasi, namun pengertian litigasi dapat dilihat di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang berbunyi “Sengketa atau beda pendapat perdata dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan.

Selain melalui litigasi(pengadilan) penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi(di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), di Indonesia biasanya disebut dengan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).⁴⁹ Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.⁵⁰

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan, sehingga dapat dipahami pengertian mediasi non litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat dengan dibantu oleh mediator dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan di luar pengadilan. Untuk itu

⁴⁹ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 8.

⁵⁰ Pasal 1 butir 10, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

sebenarnya banyak sekali masyarakat yang tanpa disadari sudah melakukan mediasi, seperti sepasang suami istri yang bertengkar dan berencana untuk bercerai kemudian salah satu diantara mereka mendatangi seorang tokoh agama untuk meminta nasihat agar rumah tangga mereka tetap utuh, kemudian tokoh agama tersebut menjalankan amanah yang dimohonkan kepadanya maka peristiwa seperti ini sudah bisa dikatakan proses mediasi non litigasi dengan tokoh agama sebagai mediatornya, dan masih banyak lagi realita pada masyarakat di sekitar kita yang tanpa disadari mereka telah melakukan proses dan tahapan-tahapan mediasi.

Makna mediasi non litigasi bisa juga dipahami melalui pendekatan mediasi dalam hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup masyarakat adat berasal dari nilai, pola pikir, dan norma yang kemudian melahirkan ciri masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.⁵¹

⁵¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat dan Nasional*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 163.

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa pada masyarakat umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang yang nilainya relatif kecil. Bahkan dalam masyarakat, penyelesaian perdamaian dengan musyawarah mufakat tidak dibatasi hanya terhadap perkara perdata saja, tetapi juga terhadap perkara-perkara pidana. Meskipun menurut prinsip hukum negara perkara pidana yang merupakan delik biasa tidak boleh diselesaikan melalui musyawarah oleh para pihak, dalam masyarakat sering kali beberapa jenis perkara pidana, misalnya perkelahian perorangan atau perkelahian antarkelompok dan pencurian ringan diselesaikan secara musyawarah dengan ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat.⁵²

Jika ditarik makna dari pengertian mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus, maka sebenarnya seseorang yang melakukan usaha perdamaian atas pihak-pihak yang sedang bersengketa di luar persidangan atau sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan maka orang tersebut sedang menjalankan tahapan mediasi walaupun bukan hakim mediator yang bersertifikat. Karena pada dasarnya mediasi itu sendiri adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR

⁵²Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 70.

(*Alternative Dispute Resolution*) yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan.

Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator atau penengah lebih sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat yang biasa disebut dengan mediator hubungan sosial (*social network mediator*).⁵³ Pada tatanan masyarakat tradisional biasanya mediator diperankan oleh kepala suku atau tokoh adat, pada kelompok masyarakat atau suatu organisasi biasanya mediator diperankan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama.

Dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh-tokoh agama sering juga diminta oleh warga dilingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris. Akan tetapi, dalam lingkup adat, para fungsionaris adat sering sekali memainkan fungsi gabungan yaitu fungsi mediator dan fungsi arbiter.⁵⁴ Pada awalnya fungsionaris melakukan pendekatan persuasif dan memberikan nasihat-nasihat, tetapi jika salah satu pihak menolak usulan dari fungsionaris adat maka sengketa diselesaikan dengan cara memutus.

Umum terjadi dalam masyarakat hukum adat, bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah tokoh adat atau ulama. Di beberapa daerah seperti Aceh,

⁵³*Ibid*, h. 35.

⁵⁴*Ibid*, h. 71.

sebagian besar ulama adalah tokoh adat, karena antara adat dan agama menyatu dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai tokoh yang mendapat kepercayaan dari para pihak, maka para tokoh adat dan ulama yang dihormati tersebut, akan menjadi penggerak yang memudahkan para pihak melaksanakan hasil mediasi. Para pihak akan merasa malu jika kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka ucapkan dihadapan tokoh adat dan ulama mereka ingkari kembali dengan tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut.

2. Jamaah Tabligh

a. Sejarah dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh adalah sebuah gerakan Islam internasional yang muncul pertama kali di India, pendiri Jamaah Tabligh adalah Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi (1885-1944 M/1303-1354 H) yang berpusat di Nizamuddin, India. Sebagai gerakan Internasional, kini aktivitas dakwah gerakan ini sudah menjangkau hampir seluruh dunia. Pengikut terbesar gerakan ini terdapat di India, Pakistan dan Bangladesh. Sejak awal 1980, gerakan ini mulai mengembangkan sayap dakwahnya sampai ke Timur Tengah, Asean, Eropa, Australia, sampai ke Amerika Latin.⁵⁵

Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang hanya ada di Indonesia akan tetapi merupakan organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, beliau lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utara Bangladesh India. Beliau wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H. Nama Jamaah Tabligh merupakan

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Suplemen Ensikopi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 266.

sebuah nama bagi mereka yang menyampaikan. Jamaah Tabligh awalnya tidak mempunyai nama, akan tetapi cukup Islam saja. Bahkan Maulana Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "gerakan iman".⁵⁶

Pada awalnya kegiatan Maulana Ilyas al-Kandahlawi adalah menyampaikan nasehat-nasehat dan bimbingan-bimbingan dengan menerangkan makna-makna Al-Qur'an dan hadis kepada santri beliau. Hanya saja beliau merasakan bahwa umat Islam hampir tidak terkesan dengan petuah-petuah dan khutbah-khutbah ini. Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan sunah Nabi hampir tidak melewati dinding-dinding pesantren dan pusat-pusat ilmu agama lainnya, umat Islam tidak lagi ingin memakmurkan masjid, hati-hati mereka tidak lagi bisa merasakan manisnya zikir, Al-Qur'an hanya tinggal gambarnya dan Islam hanya tinggal namanya. Kondisi ini membuat beliau berfikir keras dan mencurahkan segenap kemampuan untuk menyelidiki sebab-sebab umat Islam kehilangan ruhanya yang hakiki itu, pemikiran beliau sampai kepada petunjuk bahwa penyakit umat ini yang sebenarnya adalah peremehan terhadap batu fondasi untuk membangun kekuatan iman terhadap Allah Swt dan sunah Rasulullah Saw. Bermula dari sinilah Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlwai melihat bahwa satu-satunya jalan untuk menghidupkan agama dengan mengingatkan umat akan kemuliaan pusakanya yang asli agar mereka terdorong untuk memegang teguh seluruh perinsip agamanya.

⁵⁶ Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)* (Magetan: Pustaka Haromain, 2004), h. 21.

Dewasa ini Islam bukan saja dibinasakan oleh orang-orang kafir, tetapi juga oleh orang Islam sendiri. Banyak amalan yang wajib atau sunah bukan hanya ditinggalkan oleh orang awam tetapi juga oleh para tokoh agama. Kita sering membicarakan orang-orang yang meninggalkan salat dan puasa, padahal berjuta-juta manusia terjerumus kedalam jurang-jurang kemusyrikan dan kekufuran. Dan yang lebih parah lagi mereka tidak memahami apa yang mereka kerjakan merupakan kemusyrikan dan kekufuran. Perbuatan haram, fasik, kejahatan secara terang-terangan telah meningkat dengan pesat, tidak lagi tersembunyi di depan kita. Tidak memperdulikan agama, menghinaanya, dan meremehkannya sudah bukan rahasia lagi bagi siapa saja.⁵⁷

Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh biasanya dilakukan dengan dakwah *bil ḥal* atau *bil lisan*. Dalam mengaplikasikan dakwah tersebut Jamaah Tabligh membentuk beberapa model dakwah yang salah satunya adalah *khuruj fii sabilillah*. *Khuruj fii sabilillah* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin rombongan. Kegiatan dakwah Jamaah Tabligh secara umum dibagi atas dua amal yaitu amal *maqomi* dan amal *intiqoli*.

Amal *maqomi* adalah amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika berada di kampung halaman. Adapun amal *maqomi* yang dimaksud berbeda

⁵⁷ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadha'il Tabligh*, terj. Ali Mahfudzi (Yogyakarta: ash-Shaf, 2006), h. 2.

antara amal *maqomi* wanita dan amal *maqomi* pria, amal *maqomi* laki-laki yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Musyawarah masjid dan rumah.
- 2) Taklim masjid dan taklim rumah
- 3) Jaulah 1 dan 2 setiap minggu.
- 4) 2 ½ jam setiap hari.
- 5) Memenuhi *nisab khuruj fii sabilillah* 3 hari setiap bulan.
- 6) Menjaga *takbiratul ula* setiap salat berjamaah.
- 7) Tilawah Al-Qur'an, zikir, menjaga salat-salat sunah dan sunah sehari-hari.
- 8) Menghadiri malam markas, musyawarah markas, musyawarah halaqah.
- 9) *Nushroh* jamaah dan *nushroh* keluarga yang ditinggalkan.

Adapun amal *maqomi* wanita adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Menghidupkan suasana dakwah 24 jam selama di rumah dan menanamkan iman yakin terhadap kampung akhirat.
- 2) Menghidupkan *taklim wa ta'lum* di dalam rumah, dan istiqomah baik tempat maupun waktu
- 3) Menjaga salat di awal waktu, zikir pagi petang, baca Al-Qur'an dan salat-salat sunah.
- 4) Mendidik anak secara Islam sesuai dengan contoh Rasulullah Saw (*murobbiyah*/sebagai pendidik).
 - a) Anak adalah amanah Allah.

⁵⁸Maulana Muhammad Ubaidillah, *Keutamaan Masturah* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), h. 6.

⁵⁹*Ibid*, h. 7-8.

- b) *Tarbiyatul Junub*: jaga adab-adabnya.
 - c) *Tarbiyatul Janin*: masa dalam kandungan.
 - d) *Tarbiyatul Jasad*: jaga badan, pakaian, makanan dan minuman.
 - e) *Tarbiyatul Wiladah*: setelah melahirkan.
 - f) *Tarbiyatul Din*: mengenalkan agama sejak anak masih kecil dan latih untuk selalu takut hanya kepada Allah. Tanamkan ke anak untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, cinta kepada saudara dan manusia lainnya karena Allah.
- 5) Hidup sederhana.
 - 6) Taklim mingguan.
 - 7) *Nushrah* jamaah masturah dan *nushrah* keluarga yang ditinggal khuruj.

Adapun amal *intiqoli* adalah amalan dakwah diluar kampung halaman atau biasa disebut dengan *khuruj fii sabilillah*. Jamaah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah) setidaknya dalam sebulan 3 hari dan 40 hari dalam setahun.⁶⁰

Pelaksanaan *Khuruj fii sabilillah* diawali dengan dibentuknya satu jamaah melalui *halaqah* dan disetujui oleh markas yang terdiri dari minimal 5 sampai 10 orang dan dipimpin oleh seorang amir. Seorang amir dipilih berdasarkan pengalaman dan pemahamannya terhadap program dakwah Jamaah Tabligh. Setelah jamaah dibentuk dan daerah yang dituju sudah didapat selanjutnya jamaah mengikuti bayan hidayah, yaitu semacam pembekalan, nasihat-nasihat dan apa

⁶⁰ Uswatun Hasanah, *Jamaah Tabligh (Sejarah dan Perkembangan)*, El-Afkar Vol. 6 Nomor 1, Januari-Juni 2017.

maksud serta tujuan jamaah diberangkatkan. Setelah sampai ke daerah yang telah ditetapkan sebagai tempat *Khuruj fii sabilillah*, jamaah akan berkumpul di masjid karena masjid sebagai central dakwah *Khuruj fii sabilillah*. Jamaah pindah ke masjid lain setelah melaksanakan program dakwah selama 3 hari di masjid sebelumnya dan seterusnya seperti itu sampai habis masa *Khuruj fii sabilillahnya*.

Selama melaksanakan *Khuruj fii sabilillah* ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh jamaah yang biasa disebut dengan adab usul dakwah. Adab usul dakwah tersebut terbagi atas:⁶¹

- 1) Empat yang diperbanyak;
 - a) Dakwah *Ilallah*, baik dakwah secara bersama-sama seperti *jawlah* (berkeling dari rumah ke rumah untuk mengajak salat ke masjid) maupun dakwah perseorangan.
 - b) *Ta'lim wa ta'lum*, baik taklim kitab maupun *halaqah* Al-Qur'an.
 - c) Zikir dan ibadah, yaitu salat sunah, baca Al-Qur'an, zikir pagi petang dan mengamalkan doa-doa sehari-hari.
 - d) *Khidmat*, yaitu membantu urusan amir dan jamaah lainnya.
- 2) Empat yang dikurangi;
 - a) Kurangi waktu makan dan minum.
 - b) Kurangi waktu tidur dan istirahat.
 - c) Kurangi keluar masjid.
 - d) Kurangi bicara sia-sia.
- 3) Empat yang ditinggalkan;

⁶¹M Ishaq Shahab, *Khuruj Fi Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-Islah, t.t), h. 76-77.

- a) Tinggalkan berharap kepada makhluk, berharaplah hanya kepada Allah.
 - b) Tinggalkan meminta kepada makhluk, memintalah hanya kepada Allah.
 - c) Tinggalkan menggunakan barang orang lain tanpa izin.
 - d) Tinggalkan sifat boros dan mubazir.
- 4) Empat yang tidak boleh dibicarakan;
- a) Bicara masalah *khilafiyah* (perbedaan mazhab).
 - b) Bicara masalah politik.
 - c) Bicara pangkat dan jabatan.
 - d) Bicara aib masyarakat.
- 5) Empat yang dijaga;
- a) Jaga hati amir dan rombongan.
 - b) Jaga kehormatan masjid.
 - c) Jaga amalan *ijtima'i* dari pada amalan *infirodi*.
 - d) Jaga sifat sabar dan *tahamul* (tahan uji).

Adab usul dakwah seperti yang disebutkan di atas harus benar-benar menjadi perhatian dan rambu-rambu dalam perjalanan *khuruj fii sabilillah* karena sangat menentukan keberhasilan dari tujuan utama *khuruj fii sabilillah* yaitu untuk memperbaiki diri dan mengharapkan hidayah dari Allah Swt Jamaah tabligh mempunyai prinsip dasar dalam menyampaikan dakwahnya yang biasa disebut dengan enam sifat sahabat. Enam sifat sahabat tersebut yaitu.⁶²

⁶²Rifan Fajar, *Muzakarah 6 Sifat Sahabat*, (Yogyakarta: al-Bait, 2015), h. 3.

- 1) Yakin terhadap kalimat *ṭayyibah*, arti kalimat tersebut adalah tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah untuk mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita.
- 2) Salat *khusyu' wa al khudu'*, yaitu salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dihadapan Allah Swt seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Maksudnya adalah membawa sifat ketaatan kepada Allah Swt di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Ilmu dan zikir, maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah Swt pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Swt ke dalam hati.
- 4) *Ikromul Muslimin*, yaitu memuliakan sesama muslim. Maksudnya adalah menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan.
- 5) *Taṣihunniyah*, yaitu membetulkan niat. Maksudnya adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Swt
- 6) Dakwah dan *Tabligh*, yaitu mengajak dan menyampaikan. Maksudnya adalah memperbaiki sendiri dengan mengorbankan harta, diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt serta menghidupkan Agama yang sempurna pada diri sendiri dan manusia seluruh alam.

b. Dalil Hukum dan Kitab Rujukan Jamaah Tabligh Dalam Berdakwah

Dalam kitab *fadha'il tabligh* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi tertulis bahwa paling tidak ada 60 ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mendakwahkan Agama. Beberapa diantaranya adalah QS. AliImran: 110, 104, dan Al-Tahrim: 6.⁶³

M. Quraish Shihab menjelaskan surah Ali-Imran ayat 104 dan ayat 110 dengan meninjau aspek *asbab al-nuzul*, bahwa ayat ini menjelaskan kewajiban berdakwah atas umat Islam. Menurutnya, pada ayat 104, persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut, sedangkan dalam ayat 110 dikemukakan bahwa kewajiban dan tuntutan itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. Ini yang membedakan umat Islam dengan Ahli Kitab yang justru

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران/ ١١٠: ٣)

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS. Al Imran: 110). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 65.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران/ ١٠٤: ٣)

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 64.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/ ٦: ٦٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 561.

mengambil sikap bertolak belakang dengan itu. Tanpa ketiga hal yang disebut oleh ayat ini, kedudukan mereka sebagai sebaik-baik umat tidak dapat dipertahankan. Adapun kata “*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nas*” menegaskan bahwa Allah swt telah memberikan derajat paling tinggi kepada umat Nabi Muhammad saw sebagai umat terbaik diantara umat lainnya. Predikat umat terbaik ini seyogyanya dapat direpresentasikan dengan wajah sebuah umat yang penuh kebaikan dan keteladanan. Selain itu, dengan posisi tersebut tentu saja umat ini harus menyadari akan berbagai konsekuensi dan tanggung jawabnya.⁶⁴

Allah memerintahkan umat Islam agar dapat mewujudkan suatu umat yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Namun sayang, secara umum kita telah melalaikan perintah ini. Namun adakah dikalangan umat muslim yang yang berusaha demikian? Menurut Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi jawabannya tidak ada, walaupun ada jamaah muslimin atau pribadi yang berusaha mendakwahkan Islam, bukan bantuan dan kerjasama yang diterima, tetapi yang diperoleh adalah berbagai halangan dan kritikan.⁶⁵

Berikut ini hadis-hadis Rasulullah Saw tentang anjuran mendakwahkan agama:

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 221.

⁶⁵ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal, terj. Ali Mahfudzi*(Yogyakarta: ash-Shaf, 2006), h. 382.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (رواه مسلم)⁶⁶.

Artinya: “Dari Abu Said Al Khudri r.a berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا (رواه البخاري)⁶⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakariyya berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir r.huma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar

⁶⁶ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim, jilid I* (Beirut, Dar al Fikr, t.t), h. 69.

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shohih bukhori Jilid 3 (Bab Hal Yaqro 'u fil Qismah)* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 139.

dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata; "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya". (HR. Bukhori).

Dewasa ini, umat Islam dilanda kemerosotan dari segala segi. Dan mereka yang memperdulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Berangkat dari semangat inilah Jamaah Tabligh melaksanakan *khuruj fii sabilillah* dengan tujuan memperbaiki diri sendiri dan keluarga, serta mengharap turunnya hidayah dari Allah Swt ke seluruh penjuru dunia.⁶⁸ Kitab-kitab yang menjadi rujukan Jamaah Tabligh adalah:

- 1) Kitab Fadhilah Amalkarya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.

Kitab Fadhilah Amalini disusun secara tematik dan merupakan himpunan dari beberapa bab, yaitu bab Fadhilah Salat, Fadhilah Zikir, Fadhilah Al-

⁶⁸Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Amal*, terj. Ali Mahfudzi (Yogyakarta: ash-Shaf, 2006), h. 386.

Qur'an, Fadhilah Tabligh, Fadhilah Ramadhan, Keruntuhan Umat dan Kisah-Kisah Para Sahabat r.a.

- 2) Kitab Fadhilah Sadaqahkarya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi.
- 3) Kitab *Hikayatush Shahabah* karya Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Kitab ini terbagi dalam empat jilid dan masih berbahasa Arab, karenanya dalam mengkaji kitab ini biasanya ditunjuk satu ulama untuk membaca dan didengarkan oleh jamaah lainnya pada setiap pertemuan malam *kargozari* markas.
- 4) Kitab *Muntakhob Ahadist* karya Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Kitab ini berisi himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan Enam Sifat Para Sahabat.
- 5) Kitab *Riyadush Shalihin* karya Imam an-Nawawi.
- 6) Kitab Fadhilah Hajikarya Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi. Kitab ini biasa dibaca ketika menjelang musim haji.

3. Efektifitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas diartikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.⁶⁹

⁶⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 219.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.⁷⁰ Efektifitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya.

4. Konflik dan Perceraian

Banyak orang yang mengidentifikasikan konflik sama dengan fenomena kekerasan. Kuatnya paradigma berpikir seperti itu mungkin juga dilatarbelakangi oleh kenyataan, bahwa konflik-konflik di Indonesia lebih sering disertai dengan munculnya tindak kekerasan, sehingga banyak orang yang menganggap konflik sebagai sesuatu yang buruk. Akan tetapi, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa konflik tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk karena konflik berbeda dengan tindak kekerasan, dan konflik merupakan bagian dalam kehidupan pluralistik.⁷¹

Konflik dapat timbul karena beberapa sebab, paling tidak ada beberapa teori tentang sebab timbulnya konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negoisasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Teori hubungan masyarakat memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ketidakpercayaan dan permusuhan pada kelompok masyarakat. Teori negoisasi prinsip memberikan pandangan

⁷⁰ Cambel, *Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora* (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121.

⁷¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 4.

bahwa konflik dapat timbul karena adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia dan stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Teori identitas memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ancaman dari satu pihak terhadap identitas suatu kelompok. Teori kesalahpahaman memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya ketidakharmonisan dalam berkomunikasi yang dilatarbelakangi dari perbedaan budaya diantara masyarakat. Teori transformasi memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya wujud ketidakadilan dan ketidaksesuaian dalam masalah ekonomi, sosial, dan politik. Teori kebutuhan manusia memberikan pandangan bahwa konflik dapat timbul karena adanya tindakan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan seseorang.⁷²

Perceraian dalam fikih diberi sebutan dengan kata talak atau *furqoh*. Adapun talak dalam perspektif fikih adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Ada juga yang mendefinisikannya dengan melepas ikatan akad nikah dengan lafaz tertentu.⁷³

Adapun definisi talak menurut para ulama adalah sebagai berikut:

الطَّلَاق لغة: حل القيد وإلّلاق. وشرعا: حل القيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطَّلَاق ونحوه⁷⁴

⁷²*Ibid*, h. 8-10.

⁷³Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 110.

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 356.

Artinya: “*Pengertian talak secara bahasa berarti lepasnya ikatan, dan berpisah.*

Talak secara syara` adalah terlepasnya ikatan pernikahan, atau bercerai berainya akad pernikahan dengan lafaz talak.”

Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali adalah lepasnya ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi’i, talak adalah putusnya ikatan akad nikah melalui ucapan talak atau yang sama maknanya dengan itu. Menurut ulama mazhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan hilangnya kebolehan hubungan suami istri.⁷⁵ Talak merupakan perbuatan yang halal atau boleh dilakukan, akan tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁷⁶

Artinya: “*Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. (Riwayat Abu Dawud).*

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dituliskan bahwa putusnya perkawinan serta akibatnya tertera dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas putusan pengadilan. Pasal 39 berbunyi: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

⁷⁵Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 350.

⁷⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 2* (Beirut: Dar alFikr, 1999), h. 220.

tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturanperundangan tersendiri.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah efektifitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul Makhfiroh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul, Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyaidan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan), dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan:
 - a. Mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan berjalan efektif. Karena sebagian besar permasalahan keluarga dapat selesai melalui proses mediasi non litigasi tanpa harus melalui putusan pengadilan (litigasi). Selain itu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, waktu

penyelesaian relatif lebih cepat dari litigasi, serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan hukumnya boleh dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis bahkan mengandung banyak hikmah karena mediasi non litigasi mengandung kemaslahatan serta dapat menjaga perdamaian dan kerukunan bagi masyarakat.

Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Makhfiroh dengan penelitian ini yaitu, pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan bukan merupakan program yang terstruktur, akan tetapi berdasarkan kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh adat. Sedangkan pelaksanaan mediasi non litigasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu program dalam Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang sehingga pada pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan dengan mediasi non litigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, seperti pada tahapan-tahapan mediasi, cara berinteraksi dalam sidang mediasi, dan tujuan dilaksanakannya mediasi.

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Kahar Syarifuddin mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015 yang berjudul,

“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau” dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan: Berdasarkan hasil analisa efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau, menunjukan bahwa mediasi belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Baubau.
- 2) Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Baubau masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya.
- 3) Selain Ketua Pengadilan Agama Baubau, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 4) Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah Swt, dalam QS an-Nisa/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan hakam (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin yang berjudul, efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Baubau dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kahar Syarifuddin meneliti tentang efektifitas mediasi dalam proses berperkara di pengadilan atau litigasi sehingga pelaksanaan mediasinya mengikuti

aturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang efektifitas mediasi yang dilakukan di luar proses pengadilan atau non litigasi sehingga pelaksanaan mediasinya berbeda dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan.

C. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan perdamaian, karena Al-Qur'an menyebut manusia sebagai makhluk yang cenderung melakukan konflik-konflik sehingga terjadi *mafsadah* atau kerusakan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30.⁷⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan atau konflik-konflik yang mengandung *mafsadah* atau kerusakan. Konflik itu sendiri dapat timbul karena berbagai sebab, paling tidak terdapat beberapa teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu:⁷⁸ teori hubungan masyarakat, teori negoisasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita.

Teori tentang sebab terjadinya konflik di atas adalah sebagai sarana untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita. Begitu juga

⁷⁷وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/ ٣٠)

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah: 30). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 5.

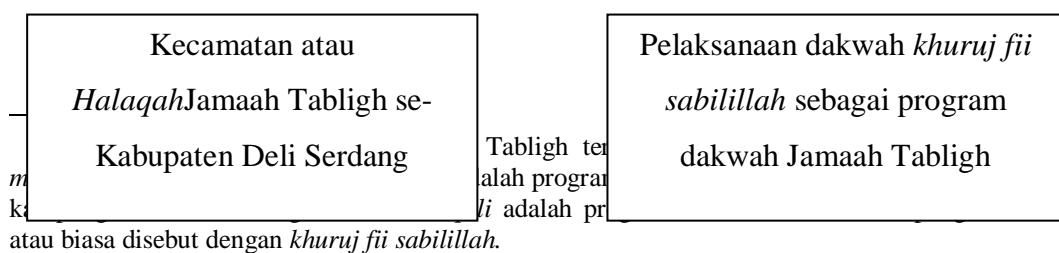
⁷⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 8.

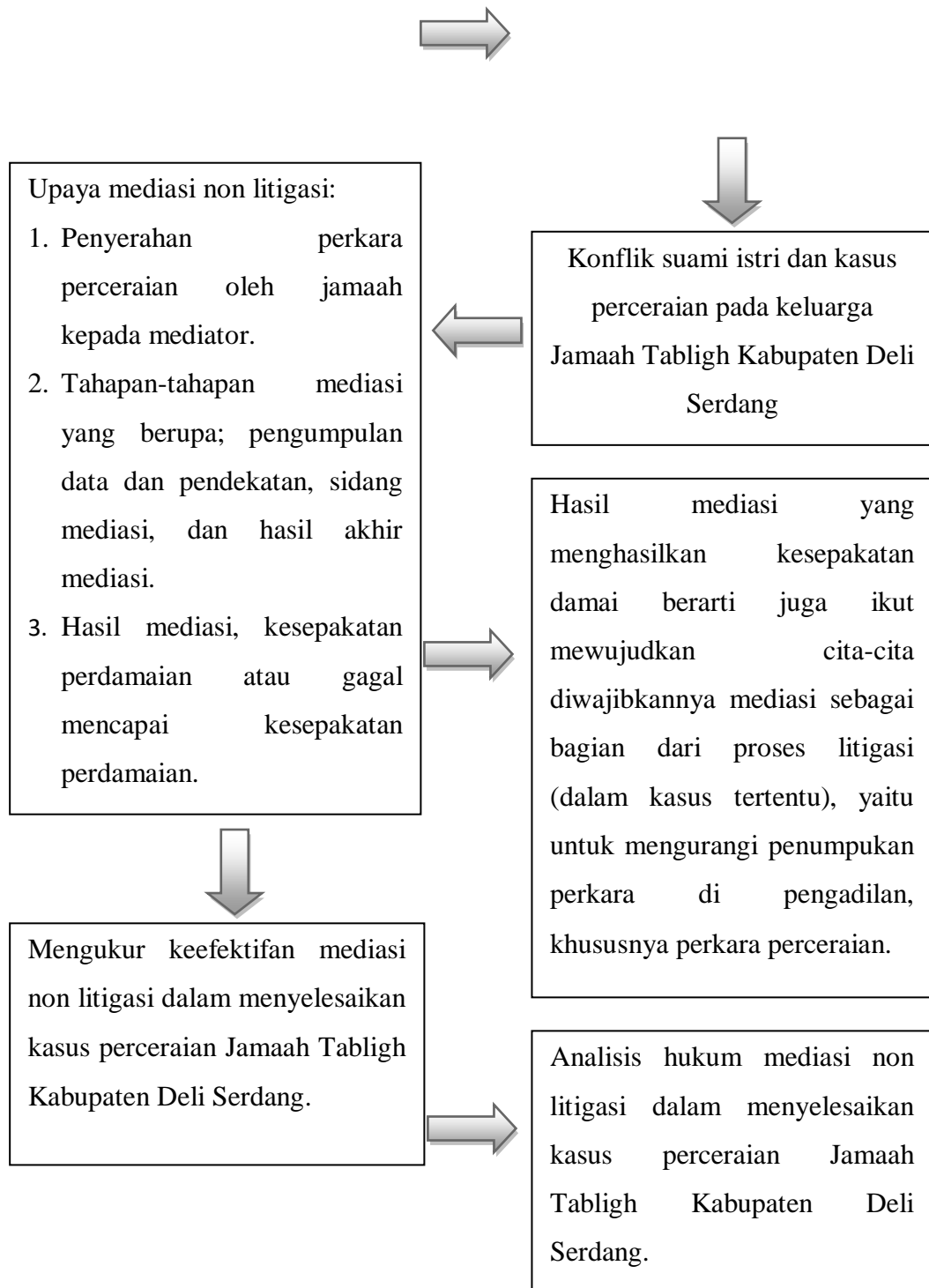
pada masyarakat yang aktif dalam organisasi Jamaah Tabligh, tentunya tidak terlepas dari konflik-konflik khususnya konflik dalam keluarga. Konflik keluarga adakalanya berhubungan dengan program kerja Jamaah Tabligh dan adakalanya tidak berhubungan dengan program kerja Jamaah Tabligh.⁷⁹

Jika terjadi konflik keluarga, yang dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh, maka sebagai bentuk respon tanggung jawab dari pengurus Jamaah Tabligh dilaksanakanlah mediasi. Mediasi bertujuan mendamaikan pihak yang bersengketa. Mediasi konflik keluarga pada keluarga Jamaah Tabligh dilaksanakan dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu tahap pendekatan dan pengumpulan data atau informasi, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi.

Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh tergolong kedalam mediasi non litigasi karena pelaksanaannya di luar proses peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk mendamaikan suami istri yang berkonflik sehingga tidak terjadi perceraian. Dengan demikian mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bisa dikatakan membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan khususnya perkara perceraian.

Berikut ini penulis sajikan skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.⁸⁰ Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 20 57' Lintang Utara sampai 30 16' Lintang Utara, dan 98 33' Bujur Timur sampai 99 27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut.⁸¹

Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km². Terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/ kelurahan definitif. Wilayah Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Melaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun,

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

⁸¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*, (Medan: CV. Rilis Grafika, 2020), h. 4.

di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo serta Kota Binjai, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.⁸²

Penelitian ini secara khusus akan dilaksanakan di lima kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Tidak semua kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang yang penulis teliti karena pasti memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pada pembahasan selanjutnya akan penulis cantumkan sample tempat penelitian mana saja yang akan diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.⁸³ Populasi dalam penelitian merupakan wilayah generalisasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mediator-mediator Jamaah Tabligh, para pihak yang sudah pernah mengikuti proses mediasi, dan tokoh-tokoh ulama Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang.

⁸²*Ibid*, h. 5

⁸³Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 93.

Mediator-mediator Jamaah Tabligh tersebar dalam kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. Nama *Halaqah* (Kecamatan) di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama <i>Halaqah</i> (Kecamatan)	No	Nama <i>Halaqah</i> (Kecamatan)
1.	Gunung Meriah	12.	Patumbak
2.	Sinembah Tanjung Muda Hulu	13.	Delitua
3.	Sibolangit	14.	Sunggal
4.	Kutalimbaru	15.	Hampan Perak
5.	Pancur Batu	16.	Labuhan Deli
6.	Namorambe	17.	Percut Sei Tuan
7.	Biru-Biru	18.	Batang Kuis
8.	Sinembah Tanjung Muda Hilir	19.	Pantai Labu
9.	Bangun Purba	20.	Beringin
10.	Galang	21.	Lubuk Pakam
11.	Tanjung Morawa	22.	Pagar Merbau

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dipilih.⁸⁴ Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik penarikan sampel *porpositive* atau biasa disebut *fundamental sampling*. Teknik *porpositive sampling* digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam teknik ini, pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian dan lebih banyak memusatkan perhatian pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk pada sampel

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, h. 173).

yang dipilih.⁸⁵ Melalui teknik penarikan sampel *purposive*, maka subjek yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mediator dilima kecamatan atau *halaqah*.⁸⁶

D. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kamera, telepon genggam, *audio recorder* untuk merekam suara, pulpen, buku dan laptop untuk mengedit data yang telah dikumpulkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

1. Observasi

Observasi adalah “suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar mengumpulkan data langsung dari lapangan.”⁸⁷ Subagyo menerangkan observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada objek penelitian.⁸⁸ Penulis

⁸⁵ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 107.

⁸⁶ Kecamatan atau *halaqah* Percut Sei Tuan, Kecamatan atau *halaqah* Batang Kuis, Kecamatan atau *halaqah* Tanjung Morawa, Kecamatan atau *halaqah* Beringin dan Kecamatan atau *halaqah* Pantai Labu.

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 265.

⁸⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

melakukan observasi yang tergolong kepada observasi non partisipatif karena penulis tidak termasuk kedalam bagian objek penelitian. Observasi dilakukan ke *halaqah-halaqah*di Kabupaten Deli Serdang. Namun kembali penulis ingatkan tidak semua *halaqah*di Kabupaten Deli Serdang menjadi objek observasi penulis, akan tetapi hanya pada *halaqah* yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagaimana telah penulis uraikan pada pemahasan sebelumnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan⁸⁹.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut⁹⁰. Penggunaan jenis wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana para

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006), h. 155.

⁹⁰*Ibid*, h. 227.

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya sehingga data yang didapat lebih dalam dan luas terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Mediator sebanyak lima orang, yaitu:⁹¹
 - 1) Drs. Zainuddin (Kecamatan Batang Kuis)
 - 2) Salman Bin Sofyan (Kecamatan Percut Sei Tuan)
 - 3) dr. Inamul Husin Kaban (Kecamatan Pantai Labu)
 - 4) Ir. H. Muhmmad Ali (Kecamatan Tanjung Morawa)
 - 5) Mariadi S.Sos.I, M.A (Kecamatan Beringin)
- b. Pasangan suami isteri Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang yang sudah pernah menjalani proses mediasi non litigasi, yaitu sebanyak lima orang.
- c. Tokoh-tokoh ulama pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebanyak 3 orang.

3. Studi Dokumen

Dokumen tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2) Buku yang berkaitan tentang program kerja Jamaah Tabligh. Dokumen tertulis selanjutnya dipelajari sehingga data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini didapatkan.

⁹¹Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, yaitu bapak Juanda selaku tim *tasykil* (pencatat jamaah yang akan berdakwah) dan bapak Salman bin Sofyan selaku pengurus Jamaah Tabligh Sumatera Utara.

F. Analisis Data

Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorisasikannya. Oleh karena itu analisis data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data, analisis dan menginterpretasikan data. Analisis data menunjuk pada kegiatan mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data, kemudian ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah atau hipotesis penelitian, dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.⁹²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan studi dokumen diolah dan disusun melalui beberapa tahapan untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur efektifitas mediasi kasus perceraian Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, adalah dengan formulasi

⁹²Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 122.

yang lebih menekankan pada kesesuaian antara tujuan dan hasil. Tingkat efektifitas dapat dihitung menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = R / T \times 100\%$$

Keterangan:

R = Realisasi

T = Target

Skor yang diperoleh akan dikonversikan melalui standar ukuran efektifitas menurut Litbang Depdagri untuk melihat tingkat pencapaian efektifitas, sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40%	Sangat Tidak Efektif
40%-59,9%	Tidak Efektif
60%-79,9%	Cukup Efektif
Diatas 79,99%	Sangat Efektif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

1. Tujuan Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh khususnya kasus perceraian mendapat perhatian khusus dari pengurus organisasi Jamaah Tabligh. Karenanya apabila ada keluarga Jamaah Tabligh yang mengalami konflik maka akan disampaikan kepada penanggung jawab suatu *halaqah*⁹³ agar dilaksanakan mediasi.

Ustaz Drs. Zainuddin dan ustaz Salman bin Sofyan yang merupakan tokoh Jamaah Tabligh Sumatera Utara dan sekaligus mediator Jamaah Tabligh untuk kawasan Deli Serdang menyampaikan, mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan:

- a. Mencegah datangnya kebencian Allah Swt, karena mencegah datangnya kebencian perceraian merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan kebencian Allah Swt sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam hadis. Untuk itu dengan mendamaikan suami istri yang berencana bercerai tentunya merupakan perbuatan yang sangat disenangi Allah Swt dan akan mencegah datangnya kebencian Allah Swt

⁹³*Halaqah* adalah suatu wilayah yang mampu menggarap beberapa *mahalla* yang ada di sekitarnya untuk memudahkan koordinasi dalam program kerja dakwah Jamaah Tabligh. lihat dalam, M. Ishaq shahab, *Khuruj Fii Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-islah, tt), h. 317.

- b. Mendakwahkan syariat Islam dan pentingnya perdamaian karena Islam sendiri adalah Agama yang mengedepankan perdamaian.
- c. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bagi seluruh keluarga Jamaah Tabligh, karena merupakan cita-cita dilangsungkannya perkawinan yang digambarkan dalam Al-Qur'an.⁹⁴
- d. Untuk meluruskan kesalahpahaman pandangan keluarga Jamaah Tabligh terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh, karena konflik yang timbul adakalanya karena salah penilaian terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh, salah memahami kerja dakwah Jamaah Tabligh, tidak mematuhi adab usul dakwah dalam menjalankan program kerja dakwah dan lain sebagainya. Untuk itu para tokoh Jamaah Tabligh bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahpahaman ini.
- e. Membentuk keluarga yang utuh dan bahagia yang memahami pentingnya kerja dakwah dalam rumah tangga dan seluruh alam, sehingga diharapkan lahir generasi-generasi yang taat kepada Allah, hafiz Al-Qur'an, alim ulama dan generasi yang *berakhlaqul karimah*.⁹⁵

Dengan usaha mendamaikan dan menyatukan kembali pasangan suami istri yang berencana berpisah berarti mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh ikut serta membantu tugas pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh juga bertujuan

⁹⁴ Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis 14 Oktober 2020.

⁹⁵ Salman bin Sofyan, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis, 14 Oktober 2020.

agar meluruskan kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh yang merupakan bentuk tanggung jawab dari pengurus Jamaah Tabligh. Selain itu dalam setiap kesempatan mediasi, mediator Jamaah Tabligh selalu menyampaikan pentingnya kerja dakwah di dalam keluarga, karena selain bertujuan untuk meredakan konflik juga meredakan azab api neraka. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an.⁹⁶

Jamaah Tabligh memahami bahwa apabila suatu keluarga hidup program dakwah dan taklim di dalam rumahnya maka rumah tersebut akan dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan, karena ketika taklim dilaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis serta nasihat-nasihat kebaikan dibacakan di dalam rumah dan di hadapan seluruh keluarga. Dengan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Swt suatu keluarga akan hidup dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*, karenanya mediasi pada Jamaah Tabligh juga bertujuan untuk menghidupkan kerja dakwah dan taklim di dalam rumah.

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Terlaksananya Mediasi Non Litigasi Pada Kasus Perceraian Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

a. Adanya Konflik

Pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian pada Jamaah Tabligh tentunya tidak terlepas dari adanya konflik yang melatarbelakanginya, penyebab

⁹⁶يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/٦: ٦٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 560.

terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh bervariasi, sebagaimana temuan si sampel yang diwawancarai, yaitu:

- 1) Kebutuhan atau kepentingan, konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi. Konflik pada keluarga Jamaah Tabligh dimana ada istri yang merasa nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. dr. Inamul Husin salah seorang mediator dalam Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang menjelaskan, kebutuhan atau kepentingan sebagai sebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh adakalanya berhubungan dengan program kerja dan faktor yang tidak ada hubungannya dengan program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Dalam pelaksanaan *khuruj fii sabilillah* pada Jamaah Tabligh, ada juga jamaah yang tidak mematuhi ketentuan dalam melaksanakan *khuruj fii sabilillah*, salah satu ketentuannya adalah membawa *tafakud* atau uang untuk keperluan selama *khuruj fii sabilillah* dan meninggalkan uang untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal di rumah. Jika uang yang ditinggalkan oleh suami yang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarga yang ditinggal tentunya konflik dalam keluarga tersebut tidak bisa dihindarkan, walaupun akan ada anggota Jamaah yang berada di rumah dan tidak sedang melaksanakan *khuruj fii sabilillah* datang untuk memberikan bantuan berupa uang, bahan pangan, dan sebagainya sebagai bentuk perhatian. Namun biasanya kasus ini terjadi bagi anggota jamaah yang rendah pemahaman agamanya dan yang baru

ikut bergabung serta masih terlalu bersemangat untuk melaksanakan kerja dakwah tanpa mematuhi dengan benar ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan *khuruj fii sabilillah*.⁹⁷

- 2) Kesalahpahaman, konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi. Ada salah seorang istri anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa penyebab konflik yang terjadi antara dia dengan suaminya adalah kesalahpahaman dalam menilai aktifitas yang dilakukan suaminya selama ikut bergabung dengan Jamaah Tabligh. Awalnya istri merasa kalau suaminya salah dalam mengikuti suatu pengajian karena banyak perilaku suaminya yang berubah, seperti cara berpakaian, waktu untuk keluarga jadi berkurang, dan termasuk juga ketidak siapanya untuk ditinggal ketika suaminya berangkat *khuruj fii sabilillah*.⁹⁸
- 3) Negoisasi prinsip, konflik terjadi karena posisi para pihak yang tidak selaras atau sepadandan perbedaan di antara para pihak. Ustaz Mariadi, M.A, salah seorang mediator dalam Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang menjelaskan, adakalanya konflik dalam keluarga itu terjadi karena prinsip berpikir yang berbeda antara suami dan istri dan sifat ego satu sama lain yang susah dikendalikan. Akhirnya dengan perbedaan-perbedaan antara suami dengan istri dan rendahnya kualitas kesabaran untuk saling

⁹⁷ Inamul Husin, *Wawancara Pribadi*, Pantai Labu, 15 oktober 2020.

⁹⁸ Puspita Dewi, *Wawancara Pribadi*, Tanjung Morawa, 15 oktober 2020.

mengalah, maka timbullah konflik yang berujung kepada kasus perceraian.⁹⁹

b. Semangat Kekeluargaan Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

Terlaksananya mediasi non litigasi pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang juga dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran untuk melaksanakan perdamaian, sehingga terjadi komunikasi antara para pihak yang berkonflik dengan pengurus Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Setelah teridentifikasi adanya konflik dalam keluarga yang berujung kepada kasus perceraian, selanjutnya suami sebagai salah satu pihak yang berkonflik mengadukan permasalahannya kepada pengurus Jamaah Tabligh pada masing-masing *mahalla*¹⁰⁰ atau wilayahnya agar mendapatkan solusi. Setiap minggunya masing-masing *halaqah* (wilayah satu kecamatan) melaksanakan musyawarah mingguan, maka disinilah penanggung jawab *mahalla* menyampaikan aduan dari *karkun*¹⁰¹ di wilayahnya kepada penanggung jawab *halaqah* agar dilaksanakan mediasi. Proses komunikasi ini tidak dilaksanakan secara formal dalam agenda musyawarah, akan tetapi melalui komunikasi pribadi *face to face* (orang dengan orang) karena menyangkut masalah internal suatu keluarga.

Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan bagi Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang, ditemukan adanya sebab-sebab yang

⁹⁹ Mariadi, *Wawancara Pribadi*, Beringin, 15 Oktober 2020.

¹⁰⁰ *Mahalla* adalah tempat tinggal para *karkun* di tempat medan usahanya di tengah-tengah masuarakat setempat. Lihat dalam, M. Ishaqa shahab, *Khuruj Fii Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-ishlah, tt), h. 317.

¹⁰¹ *Karkun* merupakan singkatan dari Karyawan Kerja Usaha Nabi. Lihat dalam, M. Ishaqa shahab, *Khuruj Fii Sabilillah* (Bandung: Pustaka Al-ishlah, tt), h. 317.

melatarbelakanginya, yaitu semangat dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam yang diajarkan oleh ulama Jamaah Tabligh, semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, proses yang mudah dan ringkas, dan tidak membutuhkan biaya yang mahal.¹⁰²

Semangat dalam mengamalkan ajaran Islam, merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan program kerja Jamaah Tabligh. Dalam daftar program ketika *khuruj fii sabilillah* terdapat *ta'lim wa ta'lum* yang biasa diartikan dengan belajar dan mengajar mengenai keutamaan-keutamaan mengerjakan suatu amalan, dan kelompok diskusi yang membahas ilmu fikih, sehingga meningkatkan pengetahuan dan semangat untuk mengamalkannya. Dalam diskusi ketika melaksanakan *khuruj fii sabilillah* yang dipimpin seorang ulama terdapat materi yang membahas hak dan kewajiban antara suami dengan istri dalam fikih. Sehingga ketika terjadi sengketa keluarga, tokoh ulama Jamaah Tabligh menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui cara penyelesaian sengketa dalam Islam.¹⁰³

Penyelesaian konflik keluarga di luar pengadilan, merupakan bentuk semangat kekeluargaan pada Jamaah Tabligh. Semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa keluarga terlihat dengan adanya perhatian dari pengurus Jamaah Tabligh kepada para pihak. Ketika ada karkun yang mengalami masalah,

¹⁰² Abu Bakar (Tokoh Ulama Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang), *Wawancara Pribadi*, Medan 14 Januari 2021.

¹⁰³ Umar Abdullah, *Wawancara Pribadi*, Lubuk Pakam 16 Januari 2021.

maka pengurus Jamaah Tabligh akan menunjuk seseorang sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Proses penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan tidak menghabiskan biaya yang mahal, waktu yang banyak dan lebih mudah jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa keluarga melalui cara litigasi. Selain tidak melalui banyak tahapan, penyelesaian sengketa keluarga melalui arbitrase dan mediasi pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tidak memerlukan biaya sama sekali, karena mediator pada Jamaah Tabligh bukanlah mediator profesional yang menerima gaji, akan tetapi merupakan tanggung jawab dan peran sosial.

3. Mediator Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Dalam mediasi terdapat mediator profesional dan mediator bukan profesional. Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai pekerjaannya dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang memanfaatkan keahliannya. Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator dengan tidak meminta upah. Pada awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam sebuah masyarakat dan mereka menjadi mediator lebih

sebagai sebuah peran atau tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan memulihkan keharmonisan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Jika merujuk kepada pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M tentang mediator pada awalnya tidak ada mediator profesional dalam pelaksanaan mediasi. Adanya pembagian mediator profesional dan bukan profesional dimulai setelah terbitnya peraturan yang menjadikan mediasi sebagai salah satu jalan penyelesaian sengketa dalam proses litigasi. Karena sebelum Peraturan Mahkamah Agung tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah berlaku di tengah masyarakat, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Mediator pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tergolong kepada mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi. Mediator sebagai penanggung jawab dan berperan sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh. Penulis mengamati bahwa pada pelaksanaan mediasi yang dimaksud maka yang biasa menjadi mediatornya adalah para pengurus *halqah* setiap wilayah atau kecamatan di Deli Serdang. Untuk itu, karena penelitian ini dibatasi hanya pada lima kecamatan maka mediator yang dimaksud dalam penelitian ini berjumlah lima orang tokoh sekaligus pengurus Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang; yaitu, ustaz Drs. Zainuddin, ustaz Mariadi, S.Sos.I., M.A, ustaz Salman bin Sofyan, Ir. H. Muhmmad Ali, dan ustaz dr. Inamul Husin Kaban.

¹⁰⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

- a. Drs. Zainuddin, beliau adalah salah seorang *jumidarhalaqah* Batang Kuissekalgus penanggung jawab Jamaah Tabligh Sumatera Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara pada tahun 1992, pensiunan Kordinator Agama PTPN II Bandar Klippa, dan berdomisili di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- b. Mariadi, S.Sos.I., M.A, beliau adalah salah seorang *jumidarhalaqah* Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Beliau menyelesaikan pendidikan magister di Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara, aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta, dan berdomisili di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
- c. Salman bin Sofyan, beliau adalah salah seorang *jumidarhalaqah* Percut Sei Tuan serta penanggung jawab Jamaah Tabligh Sumatera Utara. Walaupun berstatus muallaf, tetapi ilmu agama yang beliau miliki luar biasa, terlihat dari hafalan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mencapai ratusan jumlahnya. Beliau berdomisili di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- d. Ir. H. Muhammad Ali, beliau adalah seorang *jumidarhalaqah* Tanjung Morawa serta pengurus Jamaah Tabligh Sumatera Utara. Beliau berdomisili di Tanjung Morawa dan memimpin sebuah pesantren tahfizh khusus wanita yang telah melahirkan puluhan bahkan ratusan hafizah-hafizah.

- e. dr. Inamul Husin Kaban, salah seorang *jumidar halaqah* Pantai Labu. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Islam Sumatera Utara dan sedang dalam tahapan pendidikan dokter spesialis, aktif dalam bidang kesehatan, dan berdomisili di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

4. Proses Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi.¹⁰⁵ Tahapan-tahapan ini tentunya lebih sederhana dibandingkan dengan tahapan-tahapan mediasi dalam teori mediasi yang dirumuskan oleh para ahli.

- a. Pengumpulan data dan *ta'aruf wa ta'alub* dengan para pihak, sebelum memulai sidang-sidang mediasi, mediator melakukan perkenalan dan pendekatan serta mengumpulkan informasi tentang permasalahan para pihak untuk selanjutnya dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kunjungan ke lapangan dan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda dari wawancara pada umumnya, karena menurut Jamaah Tabligh untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah laki-laki tidak boleh berada dalam satu ruangan dengan seorang wanita dan berbicara *face to face* walaupun dalam perihal kepentingan mendapatkan informasi untuk pelaksanaan mediasi. Untuk

¹⁰⁵Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis 14 Oktober 2020.

itu, setiap mediator Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan istri-istri mereka dalam setiap proses mediasi, mediator mewawancarai atau menggali informasi dari suami yang bersengketa dan istri mediator menggali informasi dari istri yang bersengketa yang selanjutnya mereka analisis. Dalam tahapan pendekatan ini mediator memperkenalkan diri serta menyampaikan tujuan dilaksanakannya mediasi. Akhir dari tahap ini adalah menganalisis data atau informasi yang telah didapat dan dikumpulkan untuk selanjutnya merumuskan agenda sidang mediasi.

- b. Sidang mediasi, setelah informasi sudah didapat dan pendekatan mediator telah terlaksana, selanjutnya adalah tahapan sidang. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi sidang mediasi berlangsung adalah tempat tinggal pihak yang bersengketa. Sidang mediasi yang dimaksud pada Jamaah Tabligh lebih dikenal dengan istilah *bayan* atau ceramah nasihat, teknis sidang mediasi sama halnya dengan pelaksanaan tahap pendekatan, yaitu tidak bertatap muka antara laki-laki dengan perempuan. Untuk itu, biasanya ruangan yang dijadikan tempat mediasi dipasang tirai untuk membatasi laki-laki dan perempuan. Dalam tahap sidang mediasi ini awalnya mediator memberikan wejangan kepada para pihak yang biasanya berisi; pentingnya keluarga yang utuh dan bahagia, adab-adab istri kepada suami dan adab suami kepada istri, manusia tempatnya salah dan cenderung berbuat konflik, dan pentingnya *ṣulh* (perdamaian). Selanjutnya mediator membuka sesi

diskusi kepada para pihak terkait dengan argumentasi-argumentasi masalah yang dihadapi para pihak, jika permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kesalahpahaman terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh maka dalam sesi ini mediator mengajak diskusi para pihak untuk meluruskan permasalahan tersebut. Yang terakhir mediator memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan informasi-informasi yang didapat sebelumnya, sehingga dengan solusi-solusi yang diberikan mediator kepada para pihak diharapkan mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik.¹⁰⁶

- c. Penyelesaian mediasi, Surya Jaya salah seorang *karkun* dan sudah pernah melaksanakan mediasi menjelaskan, setelah tahap pendekatan dan tahap sidang mediasi terlaksana, dengan solusi-solusi yang diberikan mediator para pihak diberikan waktu untuk berpikir secara matang dan bijaksana untuk memberikan keputusan. Keputusan akhir dari kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sepenuhnya berada di tangan para pihak, bantuan mediator hanya bersifat prosedural dan substansial, yaitu berupa memimpin, merancang tahapan mediasi dan memberikan saran-saran kepada pihak yang bersengketa. Setelah para pihak mendapatkan keputusan apakah berdamai dan melanjutkan hubungan suami istri sebagai keluarga yang utuh atau tetap berlanjut

¹⁰⁶Mariadi, *Wawancara Pribadi*, Beringin, 15 Oktober 2020.

kepada proses perceraian, salah satu pihak menghubungi mediator untuk menyampaikan keputusan yang mereka ambil.¹⁰⁷

B. Efektifitas Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

1. Efektifitas Mediasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, itu merupakan perwujudan dari kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator. Karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap para pihak dan bukan memutus.¹⁰⁸ Berbicara mediasi yang efektif, bukan berarti selalu diidentifikasi dengan mediasi yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai, akan tetapi harus dilihat juga faktor-faktor lainnya yang sejalan dengan teori-teori efektifitas yang dirumuskan oleh para ahli, seperti terlaksananya proses mediasi sesuai prosedur dalam teori mediasi, dan manfaat yang didapat para pihak dengan dilaksanakannya mediasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya atau akibatnya. Efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas

¹⁰⁷ Surya Jaya, *Wawancara Pribadi*, Percut Sei Tuan, 16 Oktober 2020.

¹⁰⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106.

dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.¹⁰⁹ Jika berpijak pada teori efektifitas dalam KBBI di atas, maka mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang sudah efektif, karena tujuan dilaksanakannya mediasi sudah terlaksana, yaitu; membatalkan perceraian, mendakwahkan pentingnya perdamaian dan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan meluruskan kesalahpahaman terhadap kerja dakwah Jamaah Tabligh. Berikut ini data hasil mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh di lima kecamatan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 4. Hasil Mediasi Kecamatan Percut Sei Tuan Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Salman Bin Sofyan

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Surya Jaya dan Esi Mardanti	Salman bin Sofyan	2018	Berhasil Berdamai
2.	Reyvan Rifai dan Uci Utari Lubis	Salman bin Sofyan	2018	Berhasil Berdamai
3.	Da'i Khoiri dan Fahmawati	Salman bin Sofyan	2019	Tidak Berhasil Berdamai
4.	Angga Syahputra dan Eka Syafitri	Salman bin Sofyan	2019	Berhasil Berdamai
5.	Nasri Hasibuan dan Siti Sarah Nasution	Salman bin Sofyan	2019	Berhasil Berdamai
6.	Abdul Muis dan Sri Mela Hadiani	Salman bin Sofyan	2020	Tidak Berhasil

¹⁰⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 219.

				Berdamai
--	--	--	--	----------

Tabel 5. Hasil Mediasi Kecamatan Batang Kuis Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Drs. Zainuddin

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	M. Syahri dan Habibatul Thahura	Drs. Zainuddin	2018	Berhasil Berdamai
2.	Ikram Panjaitan dan Melind Mul Muhri	Drs. Zainuddin	2018	Tidak Berhasil Berdamai
3.	Beni Wijaya dan Yetti Tri Marlia Piliang	Drs. Zainuddin	2018	Berhasil Berdamai
4.	M. Fadli dan Puspita Dewi	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai
5.	Aswardi dan Laila Husna	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai
6.	Dendi Trimayadi dan Rahmidayati	Drs. Zainuddin	2019	Berhasil Berdamai

Tabel 6. Hasil Mediasi Kecamatan Beringin Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Mariadi, S.Sos.I, MA

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1	Gilang dan Friska Elisa	Mariadi, S.Sos.I, MA	2018	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Gunawan Hasibuan dan Triasafitri	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai
3.	M. Sofyandi dan Ade Ika Dwi	Mariadi, S.Sos.I, M.A	2019	Berhasil Berdamai
4.	Arya Fernando dan Mimi Sri Dewi	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai

5.	Khoir Harahap dan Dwi Wulandari	Mariadi, S.Sos.I, MA	2019	Berhasil Berdamai
----	---------------------------------	----------------------	------	-------------------

Tabel 7. Hasil Mediasi Kecamatan Pantai Labu Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz dr. Inamul Husin Kaban

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Hari Mulya dan Ernis Elia	dr. Inamul Husin Kaban	2018	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Weldi Riski dan Defitri	dr. Inamul Husin Kaban	2018	Tidak Berhasil Berdamai
3.	M. Fadlan dan Sasmita Lubis	dr. Inamul Husin Kaban	2019	Berhasil Berdamai
4.	Julian Mahardika dan Nur Fatimah	dr. Inamul Husin Kaban	2019	Berhasil Berdamai

Tabel 8. Hasil Mediasi Kecamatan Tanjung Morawa Berdasarkan Hasil Olahan Data Dari Wawancara Dengan Ustaz Ir. H. Muhammad Ali

No	Nama Para Pihak Yang Berkonflik	Mediator	Tahun	Hasil Mediasi
1.	Mansyura Tanjung dan Firdayani	Ir. H. Muhmmad Ali	2019	Tidak Berhasil Berdamai
2.	Riki Saragih dan Lisna Wati	Ir. H. Muhmmad Ali	2020	Berhasil Berdamai
3.	Agus Seftiandi dan Nur Afika	Ir. H. Muhmmad Ali	2019	Tidak Berhasil Berdamai

Pelaksanaan mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang pada akhirnya ada yang berhasil mendamaikan

para pihak dan ada juga yang tidak berhasil mendamaikan para pihak. Tingkat keefektifan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh jika diukur menggunakan rumus $Efektivitas = R/T \times 100\%$ maka hasilnya adalah $Efektivitas = 17/24 \times 100\% = 70,83\%$. Hasil tersebut jika dikonversikan melalui standar ukuran efektifitas menurut Litbang Depdagri, maka efektifitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan cukup efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, berhasil atau tidaknya mediasi tersebut dalam mendamaikan para pihak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor keberhasilan mediasi mendamaikan para pihak:
 - 1) Peran *jumidar* (istilah yang digunakan untuk menyebut pengurus suatu wilayah Jamaah Tabligh) sebagai mediator. Sosok *jumidar* yang juga seorang ustaz dalam perannya sebagai mediator menjadi faktor utama keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak, Riki Saragih menjelaskan, karena sikap taat dan adab terhadap pemimpin selalu disampaikan dalam muzakarah ketika *khuruj fii sabilillah* sehingga nasihat-nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh mediator mudah diterima dan sangat membantu dalam proses perundingan para pihak dalam menentukan keputusannya.¹¹⁰
 - 2) Proses yang mudah. Proses penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah dibandingkan dengan penyelesaian

¹¹⁰Riki Saragih, *Wawancara Pibadi*, Tanjung Morawa 17 Oktober 2020.

kasus perceraian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi lebih mudah karena para pihak tidak harus pergi ke pengadilan, tidak harus mengurus administrasi surat menyurat, dan tidak harus menunggu jadwal sidang yang lama.

- 3) Biaya dan waktu yang tidak banyak. Penyelesaian kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi tidak memakan biaya dan waktu yang banyak jika dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi. Tidak menghabiskan biaya yang banyak karena tidak perlu membayar penyediaan tempat sidang tahapan mediasi dan tidak perlu memberikan honor kepada mediator. Kemudahan proses mediasi dan biaya dan waktu yang ringan menjadi daya tarik tersendiri bagi anggota Jamaah Tabligh untuk menyelesaikan kasus perceraian melalui jalur mediasi non litigasi, karena memang keadaan ekonomi keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang yang lebih dominan menengah kebawah.¹¹¹
- 4) Nasihat terus menerus. Nasihat yang diberikan oleh mediator kepada para pihak tidak hanya ketika sidang tahapan-tahapan mediasi, akan tetapi secara terus menerus walaupun di luar sidang mediasi. Di luar tahapan-tahapan mediasi, setiap ada kegiatan rutin Jamaah Tabligh mediator juga menyempatkan diri untuk bertanya kepada para pihak mengenai perkembangan penyelesaian masalah keluarganya sekaligus memberikan nasihat dan masukan kepada para pihak. Dengan nasihat

¹¹¹M. Sofyandi, *Wawancara Pribadi*, Beringin 18 Oktober 2020.

terus menerus tentunya sangat membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang baik.¹¹²

- 5) Amalan salat hajat. Dalam setiap tahapan mediasi mediator selalu menganjurkan para pihak untuk melaksanakan salat hajat dengan tujuan agar Allah Swt menunjukkan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka karena yang berkuasa dalam menyelesaikan manusia adalah Allah Swt¹¹³

b. Faktor ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak:

- 1) Masalah yang sudah terlalu besar. Ketidakberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang pertama disebabkan masalah yang dialami oleh para pihak sudah terlalu besar. Maksud masalah yang sudah terlalu besar adalah masalah yang disebabkan oleh kesalahan fatal salah satu pihak terhadap pihak yang lain seperti kekerasan dalam rumah tangga dan dibiarkan terus menerus sehingga membuat salah satu pihak tidak ingin berdamai.¹¹⁴
- 2) Masalah yang sudah berulang kali. Masalah yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak dan dilakukan berulang kali menyebabkan keengganan pihak yang lain untuk berdamai. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai dilakukan lebih dari dua kali mediasi dalam permasalahan yang sama sehingga pihak yang menjadi korban merasa lelah dan mengambil sikap tidak menginginkan perdamaian lagi.

¹¹²Zainuddin, *Wawancara Pribadi*, Batang Kuis 17 Oktober 2020.

¹¹³*Ibid*

¹¹⁴Inamul Husin Kaban, *Wawancara Pribadi*, Pantai Labu, 18 Oktober 2020.

3) Campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga disini adalah bisa orang tua, saudara kandung, tetangga, dan teman. Bisikan-bisikan yang sifatnya membuat permasalahan menjadi semakin panas tentunya menyulitkan para pihak untuk bisa berdamai. Ada beberapa kasus yang awalnya para pihak sudah mendekati perdamaian dengan saling memaafkan, namun karena ada bisikan-bisikan yang menganjurkan agar jangan berdamai dengan alasan-alasan yang menjelekkan salah satu pihak akhirnya perdamaian tidak berhasil dicapai.¹¹⁵

2. Analisis Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang

Dalam Al-Qur'an, pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik adalah merupakan suatu kebaikan. Mediasi yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Hadist termasuk juga dalam mediasi sebagai upaya menyelesaikan masalah perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء/ ١١٤: ٤)

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (QS. Al-Nisa: 114).¹¹⁶

¹¹⁵Salman bin Sofyan, Wawancara Pribadi, Percut Sei Tuan 17 Oktober 2020.

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 97.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء/ ٣٥: ٤)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Nisa: 35).¹¹⁷

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/ ٤-١٢٨)

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka Allah sungguh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nisa: 128).¹¹⁸

Menurut Imam Suyuti surah an-Nisa ayat 128 di atas turun karena adanya sebab. Hadis yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat di atas salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini:

¹¹⁷Ibid, h. 84.

¹¹⁸Ibid, h. 99.

“Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya berkata, Aisyah berkata, wahai anak saudariku Rasulullah Saw. bersabda, beliau tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam pembagian giliran tinggalnya bersama kami. Pada siang hari beliau berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menyentuhnya hingga beliau sampai pada istri yang menjadi gilirannya, lalu beliau bermalam padanya. Dan Saudah binti Zam’ah ketika takut akan diceraikan oleh Rasulullah Saw. ia berkata, wahai Rasulullah Saw. berikanlah giliranku untuk Aisyah, maka Rasulullah Saw. melakukannya, Aisyah berkata, tatkala Rasulullah Saw. telah melakukan hal tersebut turunlah firman Allah Swt Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* dari suaminya”. (HR. Abu Dawud)¹¹⁹

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas sangat jelas membolehkan dilaksanakannya mediasi untuk menyelesaikan suatu konflik atau sengketa, bahkan perbuatan mendamaikan merupakan suatu kebaikan yang Allah Swt janjikan balasan berupa pahala yang besar. Begitu juga dengan kasus perceraian, pada surah al-Nisa ayat 35 dan 128, Al-Qur’an menganjurkan dilaksanakannya *ṣulh* atau perdamaian baik pada kasus *syiqaq* maupun kasus *nusyuz*. Kisah Saudah binti Zam’ah yang menjadi sebab turunnya surah al-Nisa ayat 128 menggambarkan suatu sikap usaha perdamaian atau usaha agar tidak diceraikan oleh Rasulullah Saw. Kebolehan melakukan mediasi juga dikuatkan dengan hadis Nabi berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ صَحَّحَهُ¹²⁰)

Artinya: “Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali

¹¹⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur’an*, Terj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 163.

¹²⁰ al Hafidz Ibnu Hajar al ‘Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Makkah: al Haramain, t.t), h. 185.

perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram."(Hadits shahih riwayat Tirmidzi).

Hadis di atas menunjukkan kebolehan melaksanakan perdamaian antara kaum muslimin dalam urusan yang dibenarkan oleh hukum Islam, yaitu tetap pada prinsip menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Perdamaian antara kaum muslimin tidak boleh dilaksanakan apabila perdamaian tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh tentunya termasuk ke dalam perdamaian antara kaum muslimin yang dibenarkan, alasannya karena mediasi tersebut bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan yaitu dengan kembalinya kepada ikatan perkawinan dan menolak kemafsadatan yaitu dengan mencegah terjadinya pertengkaran yang berdampak kepada perceraian. Dalam fikih tujuan syara' disebut:

جلب المصالح ودرء المفاسد¹²¹

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan”.

‘Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maṣlahah*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maṣlahah*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *mafsadah* ataupun *maṣlahah* ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan

¹²¹A. Ajazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*(Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 27.

ada yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang *maṣlahah* diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh syariah.¹²² Oleh karena itu mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang dalam hukum Islam boleh dilakukan.

Kasus perceraian, yang merupakan bagian dari sengketa keluarga, pelaksanaannya diatur dalam undang-undang perkawinan. Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertulis “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan para pihak”. Dalam aturan yuridis, pelaksanaan kasus perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan. Sebelum pengadilan memberikan penetapan atau putusan talak, hakim dalam proses persidangan terus memberikan nasihat dan mengupayakan perdamaian para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, dan pada Pasal 131 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan izin bagi suami untuk mengikrarkan talak setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak.

Tata cara perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata juga mengharuskan bagi hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak

¹²²Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* (t.t.: Dar al-Jail, 1980), Juz I, h. 11. Dikutip oleh A. Ajazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 27.

atau *ṣulh* sebelum diberikannya izin ikrar talak oleh Pengadilan Agama bagi suami. Setelah *ṣulh* dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama, ternyata tidak juga berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka hakim dibenarkan memberikan izin ikrar talak bagi suami. Artinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mediasi juga termasuk bagian upaya penyelesaian perceraian dalam proses litigasi di Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang di atas menjelaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dengan proses mediasi.

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan selanjutnya pada tahun 2008 Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian keduanya dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan PERMA tersebut maka mediasi sudah menjadi bagian dari hukum acara perdata.

Pada bagian pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa “Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata”, namun pada BAB VII PERMA tersebut termuat pembahasan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi. Salah satu isi dari BAB VII PERMA tersebut adalah “keterpisahan mediasi dari litigasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukkan mediator”. Artinya prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata, namun pelaksanaan mediasi setelah adanya penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukkan mediator terpisah dari litigasi.

Sejak lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi sudah menjadi bagian dari litigasi, akan tetapi realita pada masyarakat di Indonesia masih banyak yang menjadikan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk itu penulis berpendapat, mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa terbagi kepada dua kategori, yaitu mediasi litigasi dan mediasi non litigasi. Maka dapat disimpulkan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang termasuk kepada mediasi non litigasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam memahami hukum harus dilandasi kepada asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia yang selanjutnya disebut dengan istilah hukum progresif. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan

sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹²³ Hukum progresif mempunyai tiga karakteristik yaitu:

1. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum adalah untuk manusia.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum.
3. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Karena peranan perilaku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.

Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena memang prosedur pelaksanaannya bukan dari jalur litigasi dan mediator pada mediasi tersebut bukanlah mediator yang bersertifikat. Namun, jika dilihat melalui kacamata hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Karakteristik hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo pada dasarnya bermuara kepada dua poin yaitu, hukum adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam berhukum. Kaitannya dengan mediasi kasus perceraian pada keluarga

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 154.

Jamaah Tabligh adalah, bahwa banyak sekali manfaat yang didapat dengan dilaksanakannya mediasi tersebut. Kemanfaatan yang dirasakan oleh para pihak dalam mediasi tersebut diantaranya; biaya yang dikeluarkan lebih ringan dibandingkan dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi, proses yang lebih mudah dan sederhana dengan penyelesaian kasus perceraian melalui jalur litigasi, dan efektif dalam mendamaikan para pihak.

Hukum itu sendiri dalam perspektif hokum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah untuk manusia dan menolak status quo dalam berhukum. Artinya mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang
 - a. Maksud dan tujuan mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Mediasi non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan. Mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh bertujuan, mencegah datangnya kebencian Allah Swt, karena perceraian merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan kebencian Allah Swt, mendakwahkan syariat Islam dan pentingnya perdamaian, agar terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan untuk meluruskan kesalahpahaman pandangan keluarga Jamaah Tabligh terhadap program kerja dakwah Jamaah Tabligh. Tujuan mediasi tersebut ringkasnya adalah untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa kasus perceraian agar tidak terjadi perceraian diantara mereka. Tujuan mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh sebenarnya sejalan dengan tujuan diintegrasikannya mediasi dalam proses litigasi atau peradilan, Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh membantu mengurangi penumpukkan perkara perceraian di pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama.

- b. Proses mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. Proses mediasi yang dimaksud terbagi ke atas 3 tahapan yaitu, tahap *ta'aruf wa ta'alub* (perkenalan dan pendekatan) dengan para pihak dan pengumpulan data, tahap sidang mediasi, dan tahap penyelesaian mediasi. Sedangkan mediator pada Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tergolong kepada mediator bukan profesional, karena tidak meminta upah dan melaksanakan tugas sebagai mediator bukanlah sebuah profesi, melainkan sebagai tanggung jawab serta peran sebagai tokoh dan pengurus Jamaah Tabligh.
 2. Efektifitas Mediasi Non Litigasi Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang
 - a. Efektifitas mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari hasil analisis rumus efektifitas setelah dikonversikan melalui standar ukuran efektifitas menurut Litbang Depdagri, maka efektifitas mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang berjalan cukup efektif. Kefektifan mediasi tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan utama mediasi tersebut, yaitu mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menggagalkan perceraian para pihak.
 - b. Mediasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang tidak termasuk ke dalam bagian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Pengadilan karena memang prosedur pelaksanaannya bukan dari jalur litigasi dan mediator pada mediasi tersebut bukanlah mediator yang bersertifikat. Mediasi non litigasi kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang walaupun bukan bagian dari PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi tersebut boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

B. Saran

1. Kepada para suami dari Jamaah Tabligh dalam melaksanakan program kerja dakwah harus tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus Jamaah Tabligh. Karena salah satu penyebab terjadinya konflik pada keluarga Jamaah Tabligh adalah tidak mematuhi ketentuan dalam melaksanakan program kerja dakwah. Untuk itu, dengan mematuhi ketentuan tersebut diharapkan dapat mengurangi konflik yang terjadi di dalam keluarga.
2. Kepada pengurus Jamaah Tabligh, hendaknya mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh khususnya kasus perceraian dijadikan sebagai bagian dari program kerja Jamaah Tabligh secara resmi dan tertulis. Mengingat selama ini mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh hanya sebatas respon sosial terhadap konflik yang terjadi dalam keluarga Jamaah Tabligh. Dengan terciptanya kemaslahatan yang begitu besar dari pelaksanaan mediasi pada keluarga Jamaah Tabligh, penulis memandang kegiatan ini merupakan

kegiatan yang sangat baik dan harus terus dilaksanakan dengan menjadikannya sebagai bagian dari program kerja Jamaah Tabligh.

3. Kepada pembaca kiranya penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan masih banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi penulisan maupun substansi yang terkandung dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis berharap adanya masukan saran atau kritikan yang membangun agar penelitian ini lebih sempurna nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas. Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- al Asqolani. al Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Makkah: al Haramain, tt.
- Arfa. Faisar Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Atho Mudzhar, “*Konstruksi Fatwa dalam Islam*”, *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015)
- al-Bukhori. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shohih bukhori Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Bungin. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cambel, *Riset dalam Evektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Fajar. Rifan, *Muzakarah 6 Sifat Sahabat*, Yogyakarta: al-Bait, 2015.
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015
- Harahap. Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ibnu Muhajir. Akhyar, *Kamus Fiqh Plus*, Surabaya: Indah Surabaya, 1994.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Fuad Syaifudin Nur, *Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- al-Kandahlawi. Muhammad Zakariyya, *Fadha'il Tabligh*, terj. Ali Mahfudzi, Yokyakarta: ash-Shaf, 2006.

- Lestari. Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam ndonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa, 2013.
- Rahardjo. Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.
- Shahab. Ishaq, *Khuruj Fii Sabilillah*, Bandung: Pustaka Al-ishlah, tt.
- Suadi. Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Summa. Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- al-Suyuti. Jalal al-Din, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Tim Penyusun Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama, (Bimbingan Teknis Bagi Hakim, Mahasiswa, dan Praktisi Hukum)*, Medan: CV Dharma, 2012.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Ubaidillah. Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010.
- Usmani. Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Muslim. Abu Husain bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, Beirut, Dar al Fikr, tt.
- Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, Terjemah. Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyimi, 2010.

Sulaiman. Abu Dawud bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 2*, Beirut: Dar alFikr, 1999.

al Rosyid. Mulwi Ahmad Harun, *Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Jaulah (Jamaah Tabligh)*, Magetan: Pustaka Haromain, 2004.